

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dunia saat ini membawa dampak yang sangat berarti bagi manusia. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya yang cukup cepat membawa perubahan bagi diri manusia dan lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang melupakan sisi budaya juga terjadi pada negara-negara di Asia khususnya di Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara yang mengedepankan nilai adat istiadat budaya dalam perilaku kehidupan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai luhur, adat istiadat dan budaya yang di dalamnya termasuk pendidikan menjadi tantangan yang sangat berat untuk dijaga. Nilai luhur tersebut tentu perlu diintegrasikan melalui dunia pendidikan. Hal ini merupakan pekerjaan besar bagi bangsa Indonesia terutama pada bidang pendidikan. Arah kebijakan yang berorientasi pada pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur budaya haruslah memiliki dasar dan memiliki dukungan yang cukup kuat untuk kemudian diselenggarakan pada lembaga/institusi pendidikan.

Institusi dan lembaga pendidikan harus memiliki suatu sistem yang terencana untuk menciptakan dan mengembangkan suasana belajar. Pengembangan potensi yang ada pada manusia harus berorientasi pada nilai-nilai dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang berhubungan dengan usaha-usaha manusia. Proses budaya pada sektor pendidikan adalah usaha untuk mewariskan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Pendidikan bertujuan untuk melahirkan generasi yang memiliki kemampuan intelektual dengan tetap memelihara kepribadian dan identitas bangsa yang berbudaya.

Esensi pendidikan memiliki dua misi yaitu sebagai *transfer of values* dan *transfer of knowledge*. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk membuat manusia menjadi

lebih baik. Pendidikan mengandung arti manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Proses dari kehidupan naluriah menjadi kehidupan yang berkebudayaan.

Saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0, dimana pemerintah mendorong untuk melakukan *empowering human talent* guna memperkuat generasi muda khususnya pelajar untuk menguasai inovasi teknologi. Indonesia telah berhasil menunjukkan kemampuan di dunia internasional dengan menempati peringkat ke empat dari 15 negara industri. Pemerintah telah menyiapkan skenario untuk menghadapi era 4.0. Langkah yang dapat kita lihat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus dipacu melalui pendidikan formal dan non formal. Era 4.0 adalah era yang menekankan pada pembaharuan teknologi digitalisasi baik pada sektor ekonomi, kecerdasan buatan, *big data* (data dalam skala besar) dan penggunaan mesin sebagai tenaga kerja.

Namun demikian, para pendidik masih banyak yang belum terbiasa dengan penerapan istilah revolusi industri 4.0. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari istilah itu sudah sangat akrab. Dampak dari revolusi Industri 4.0 sudah dapat dirasakan dengan hilangnya beberapa jenis pekerjaan karena digantikan oleh sistem kerja digital.

Hasil studi yang dilakukan oleh *Mckinsey Global Institute* di 46 negara seperti diberitakan di detiknews mengungkapkan bahwa lebih dari 800 juta pekerjaan akan tergantikan akibat otomatisasi digital. Hal ini adalah suatu tantangan tersendiri dalam bidang pendidikan di masa yang akan datang. Sistem pendidikan sekarang harus mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi saat ini (Eduardo, 2019).

Dengan memahami kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, maka penting pemahaman tentang kebudayaan. Identitas budaya merupakan ciri dari suatu bangsa yang dapat membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri dari perangkat konsep dan nilai-nilai yang lengkap termasuk mengatur hubungan vertikal, horisontal serta

antara manusia dengan alam semesta. Untuk itu, upaya memahami budaya sebagai akar pondasi suatu bangsa masih membutuhkan kerja keras yang konsisten sehingga mampu mengejar ketertinggalan. Sinergi segenap komponen bangsa dari proses kebijakan sampai implementasi di lapangan harus terus diperkuat. Hal ini dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju dan berdaya saing. Kepemilikan karakter bangsa dapat menjadikan bangsa Indonesia bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya daerah di Indonesia.

Dengan mengenal lebih mendalam budaya serta memahami, maka akan semakin besar rasa cinta akan tanah air. Nurbolat Bogenbayev dalam penelitiannya mengatakan bahwa anak yang mengenal tradisi dan adat istiadat akan tumbuh menjadi generasi yang patriotis dan nasionalis.

Offering a national upbringing while training history comprehensively makes the new generation familiar with nation's traditions, customs, and leads them to absorption of them. This new approach, which brings up the new generation patriotically and knowledgeably, has its purpose education of the national spirit. The generation that receives this national upbringing will become truly national citizens. (Bogenbayev, 2014)

Apabila kita melihat keberhasilan salah satu negara di Asia yaitu Jepang dalam menerapkan pendidikan berbasis budaya, terlihat betapa pentingnya pendidikan berbasis budaya itu diterapkan. Jepang memulai pendidikan berbasis budaya sejak dimulainya restorasi Meiji. Jepang yang pada mulanya sebagai negara tertutup mulai membuka diri dan menjadikan barat (Amerika dan Eropa) sebagai kiblat utamanya. Tercatat sejak restorasi Meiji dimulai, Jepang berkembang dengan sangat pesat dan sekarang menjadi salah satu negara maju di kawasan Asia dan dunia.

Hal yang paling menarik dari Jepang adalah perkembangan, kemajuan dan adopsi budaya Amerika dan Eropa-nya. Adopsi budaya tersebut tidak lantas mengakibatkan Jepang mengikuti budaya Amerika atau Eropa. Walaupun pengaruh budaya Amerika dan Eropa besar,

tidak lantas Jepang melupakan budaya dan kearifan lokal peninggalan leluhurnya. Kekuatan mempertahankan nilai-nilai budaya nenek moyang merupakan hal positif yang dipertahankan

Di Jepang, pendidikan merupakan hal yang sudah lama dianggap penting. Pada akhir Tahun 1800-an, para pemimpin Meiji membentuk sistem pendidikan publik. Sistem ini mampu meningkatkan kemampuan literasi. Bahkan pada periode Edo, lebih dari 70% dari semua anak-anak di Jepang pergi ke sekolah. Saat ini, 99% orang di Jepang bisa membaca dan menulis. Sekolah saat ini masih dipandang sebagai batu loncatan yang sangat penting di awal kehidupan. Sistem pendidikan di Jepang diatur dalam *Fundamental Law of Education (Kyoiku kibonbo)*, diundangkan Tahun 1947 dan mengalami revisi Tahun 1999. Tahun 2006, untuk memperkuat pendidikan yang berbasis budaya dan kehidupan lokal maka pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang tentang pendidikan "*Basic Act on Education*" pada Tahun 2006 (*Ministry of Education, Culture, Sports, 2006*).

Paulina Pannen di dalam Suprayekti (2014) menjelaskan bahwa penerapan pendidikan berbasis budaya penting dilakukan. Beberapa negara di dunia juga memiliki keunggulan pendidikan sesuai dengan budaya dan lingkungannya. Tiap negara memiliki keunggulannya masing-masing tentang ilmu yang diajarkan bersamaan dengan proses pembelajaran siswa tentang budaya dari komunitasnya. Selain Jepang, terdapat beberapa negara yang telah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya. Amerika Serikat dengan program yang dilakukan di California yang dinamakan SUAVE (*Socios Unidos para Artes Via Education*). Program ini dirancang untuk membantu pengajar/guru untuk menggunakan alat seni dalam mengintegrasikan mata pelajaran.

Di Indonesia, penerapan pendidikan berbasis budaya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penerapannya dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sistem pendidikan yang sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia. Ciri khas masyarakat Indonesia terlihat dari budaya dan karakter bangsa Indonesia.

Ciri kebudayaan bangsa Indonesia berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan budaya dan sifat yang suka menolong dan bergotong royong serta memiliki toleransi terhadap perbedaan. Budaya ini menjadikan masyarakat Indonesia bisa hidup rukun secara berdampingan. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang tangguh dan tidak mudah menyerah serta memiliki sifat suka bekerja keras. Nilai-nilai dari budaya tersebut tentunya harus terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Menurut Koentjaraningrat (1986), kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang diperoleh dengan belajar, yang memuat tiga wujud kebudayaan. Tiga wujud kebudayaan itu adalah nilai-nilai, ide atau gagasan berupa budaya nonfisik (*intangible*), perilaku (*semi-intangible*), dan budaya fisik (*tangible*). Dari dimensi isinya, kebudayaan memuat tujuh unsur universal, terdiri atas: (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) kesenian.

Melihat apa yang dijelaskan di atas maka kebijakan dan implementasi pendidikan berbasis budaya harus dikelola lebih optimal. Pengelolaan optimal dilakukan dengan mengintegrasikan dan memberi muatan budaya dan membuka secara luas nilai-nilai luhur yang berasal dari daerah setempat. Dengan demikian, pendidikan menjadi suatu usaha yang terintegrasi dan kolaboratif dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Implementasi dalam konteks ini adalah terdapat kerjasama antara pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan pendidikan di sekolah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat pendidikan di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan. Berdirinya sekolah berbasis agama Islam

Muhammadiyah di kota Yogyakarta menjadi awal dari lembaga pendidikan yang mempunyai ciri keagamaan. Sejarah panjang pendidikan di kota Yogyakarta sudah dimulai sejak era kebangkitan nasional. Raden Mas Suwadi Suryaningrat yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara kerabat dari Kadipaten Pakualam yang kemudian mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Lembaga pendidikan Taman Siswa sarat dengan muatan kebudayaan nasional.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, dan atas dukungan Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX maka berdirilah perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada. Sejak berdirinya Universitas Gadjah Mada, banyak putra putra daerah dari seluruh wilayah di Indonesia datang dan belajar di kota Yogyakarta. Para pelajar ini tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga belajar dari kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta.

Sebagai pusat pendidikan, Yogyakarta tidak hanya sebagai wilayah yang sangat humanis pluralistik tetapi juga bernuansa budaya Jawa yang sangat kental. Yogyakarta tidak hanya menjadi pusat pendidikan siswa dari wilayah di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Dengan berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi, baik perubahan nasional dan internasional yang mempengaruhi perkembangan dunia, maka Yogyakarta bertekad untuk menjadi pusat pendidikan tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga di Asia tenggara pada Tahun 2025.

Diharapkan pada Tahun 2025 Yogyakarta sudah mampu menjadi pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata yang terkemuka di Asia Tenggara. Yogyakarta diharapkan memiliki lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera (RPJP DIY 2009). Untuk memujudkan visi ini maka pemerintah daerah merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.

2. Mewujudkan budaya *adiluhung* yang didukung dengan konsep pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosikultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Kondisi ini secara umum akan dapat dicapai dengan memperkuat pendidikan berbasis budaya. Kehidupan berbudaya terlihat dari manusia serta lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mendukung dan mendorong manusia berbudaya. Manusia dengan sifat satriya yang menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan tujuan wisata terkemuka pada Tahun 2025.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan penting serta posisi yang strategis di dalam konteks Indonesia. Dalam sejarahnya Kota Yogyakarta telah mengalami beberapa peristiwa penting yang menunjukkan akar tradisi Jawa masih kuat tapi tanpa mengesampingkan modernitas sehingga menjadikan kota yang dinamis dan humanis. Keberadaan Yogyakarta merupakan salah satu kunci kemerdekaan Indonesia.

Pemahaman falsafah *memayu hayuning bawana* sebagai isi, *golong gilig* sebagai semangat, *nyawiji, greget, sengguh ora mingkuh* sebagai *wataking satriya* Ngayogyakarta perlu diterapkan dalam pendidikan, baik formal maupun informal. Pemahaman falsafah tersebut perlu dilakukan sebagai penguatan jati diri dan pembentukan watak/karakter manusia berbudaya jawa. Dengan falsafah ini akan mampu mengembangkan kebudayaan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dirasa sangat penting mengingat Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya dan pariwisata yang harus mampu menjadi pusat pendidikan bagi masyarakatnya.

Diharapkan dari Kota Yogyakarta lahir manusia yang berbudaya yang berwatak satriya untuk kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sesama manusia. Keinginan untuk penguatan dan pencerahan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan ini diperkuat dengan adanya fenomena yang menunjukkan ketidakharmonisan perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter yang muncul secara nasional. Untuk itu, Daerah Istimewa Yogyakarta mewacanakan menjadikan Yogyakarta menjadi pusat pendidikan berbasis budaya lokal dan pluralistik.

Orientasi pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia yang mendunia dengan nilai-nilai budaya Jawa diangkat dan digunakan secara tepat dan arif sebagai landasan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, saat ini Yogyakarta terjadi krisis kebudayaan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan terhadap pelajar SMA di Kota Yogyakarta pada Tahun 2017 banyak terjadi kasus *bullying*. Hasil penelitian menyebutkan sebanyak 210 orang mengalami tindakan *bullying*. *Bullying* yang paling banyak dialami remaja adalah *bullying* verbal sebesar 47 %, fisik sebesar 30%, sosial sebesar 20% dan cyberbullying 3%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja mengalami *bullying* berpeluang 1,5 kali lebih besar mengalami depresi dibandingkan dengan remaja yang tidak mengalami *bullying*. Dalam penelitian ini diketahui bahwa depresi pada remaja SMA yang mengalami tindakan *bullying* lebih tinggi dari remaja yang tidak mengalami tindakan *bullying* (Gitry Marela, Abdul Wahab, 2017).

Krisis kebudayaan tentunya akan berdampak pada krisis karakter. Terlihat beberapa kasus dihadapi bangsa Indonesia (terutama Yogyakarta) dewasa ini, seperti tawuran dan *bullying*. Data KPAI mencatat kasus *bullying* menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat. Dari 2011 hingga Bulan Agustus 2014, KPAI mencatat 369 kasus (Davit, 2014). Angka ini tentu perlu ditekan agar tindakan *bullying* dapat diminimalisir terjadinya.

Konsep dasar pendidikan berbasis budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menempatkan posisi kebudayaan pada tiga lingkup. Pertama budaya sebagai muatan/isi pendidikan, kedua budaya sebagai metode pelaksanaan/pembelajaran, dan ketiga budaya sebagai konteks lingkungan pendidikan. Tiga lingkup ini termasuk dalam kaitannya dengan manajemen pendidikan.

Kondisi masyarakat yang semakin jauh dari lingkungan budayanya merupakan suatu masalah yang dilematis. Globalisasi dan teknologi informasi cenderung membuat manusia menjadi individualis dan tidak mau berproses. Kebudayaan memerlukan suatu proses yang panjang dan membutuhkan kerjasama kemudian dilakukan di lingkungannya sendiri. Theodore Brameld dalam bukunya "*Cultural of Education*" menyatakan bahwa adanya keterkaitan yang kuat antara pendidikan dengan kebudayaan antara satu urusan dengan urusan yang sama yaitu pengembangan nilai (Waterman et al., 1958).

Pendidikan berbasis budaya didalamnya mencakup pendidikan karakter. Pendidikan berbasis budaya akan mampu menangkal tindakan asusila seperti kekerasan terhadap anak, *bullying* dan tindakan kriminalitas remaja lainnya. Dalam penerapan di kelas, semua guru boleh mengembangkan pendidikan karakter dengan menyisipkan (terintegrasi) ke dalam pelajaran yang diajarkan.

Kebutuhan akan pendidikan berbasis budaya ditindak lanjuti Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi DIY dengan penyusunan Perda Pendidikan Berbasis Budaya. Perda No. 5 Tahun 2011 muncul sebelum Undan-Undang Keistimewaan (UUK) pada Tahun 2012. Untuk itu, perlu penyesuaian untuk nilai-nilai keistimewaan. Dalam UUK itu terdapat ajaran tentang sopan santun, unggah ungguh, dan kearifan lokal lainnya sesuai yang terdapat di wilayah Yogyakarta. Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2011 kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Nilai Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dilanjutkan dengan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya.

Perda tentang pendidikan berbasis budaya ini diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan kondisi kota Yogyakarta yang terjadi saat ini. Pemerintah DIY berusaha agar peserta didik tumbuh dan berkembang serta mempunyai budaya dan karakter yang kuat. Sumber daya manusia yang berbudaya akan mampu berinteraksi dan bersaing dengan masyarakat global. Sumber daya manusia yang bersumber pada budaya akan dapat menjadi subyek pembangunan yang mumpuni dalam segala bidang. Pendidikan berbasis budaya yang dimaksud dalam Perda adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur.

Adanya peraturan daerah tersebut diharapkan tindakan negatif yang melibatkan peserta didik bisa diminimalisir atau dihilangkan. Dihadapkan dari sisi tantangan yang semakin kompleks, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus menghadapi era globlisasi komunikasi internasional terutama pada era 4.0. Tantangan yang lain adalah dinamika perkembangan dunia pendidikan yang mencakup persaingan dan jaringan kerjasama. Selain itu desentralisasi manajemen pendidikan yang meliputi akses, mutu dan akuntabilitas pendidikan juga menjadi tantangan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar atau suatu proses dinamis agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan baik spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak, serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat (Renstra Perangkat Daerah DIY, 2017).

Kenyataan sosial dan budaya yang diuraikan di atas membutuhkan suatu penanganan yang tepat untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan berbasis budaya. Nilai-nilai kebudayaan yang akan digunakan harus tepat sebagai landasan yang

mendasari pendidikan di DIY. Dalam Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2011 Bab I Pasal (8)

dijelaskan bahwa:

Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta peka terhadap perkembangan dunia (Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, 2011).

Dari tahun 2015 sampai 2016 terdapat kenaikan jumlah sekolah pada seluruh jenjang yang melaksanakan pendidikan berbasis budaya sebagaimana terlihat pada tabel 1.1. Namun, dukungan bagi sekolah lain masih diperlukan untuk turut meningkatkan kualitas serta mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara.

Tabel 1.1 Data Sekolah Berbasis Budaya

No	Kab/Kota	Jenjang Pendidikan							
		SD		SMP		SMA		Total	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Kabupaten Sleman	65	80	34	39	8	10	107	129
2	Kabupaten Bantul	67	82	33	41	9	16	109	139
3	Kabupaten Kulon Progo	50	67	22	27	7	9	79	103
4	Kabupaten Gunungkidul	54	73	27	34	9	13	90	120
5	Kota Yogyakarta	51	65	23	29	11	16	85	110
DIY		287	367	139	170	44	64	470	601

(Dinas Dikpora DIY, 2017)

Peningkatan daya saing mutu harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya. Tidak sekedar menang atau unggul, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY adalah lembaga yang memiliki tupoksi dalam bidang pendidikan pada tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Dikpora

memiliki kewajiban agar pendidikan berbasis budaya dapat diimplementasikan pada seluruh satuan pendidikan di wilayah DIY.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Disdikpora Provinsi DIY pada hari Rabu, 21 Maret 2018 di Kantor Dikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa penerapan pertama kali secara resmi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 adalah pada tahun 2014. Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No. 1980 Tahun 2014 tentang Penetapan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya. Di dalam SK tersebut, ditetapkan 100 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Yogyakarta yang dijadikan model sekolah berbasis budaya.

Penyeleksian dan penetapan sekolah model dilakukan dengan observasi dan analisis terhadap kemajuan program budaya dari masing-masing sekolah. Program budaya yang diunggulkan seperti batik, karawitan, pencak silat, tari gaya Yogya, pedalangan wayang, kethoprak, olahraga tradisional, sesorah, macapat, geguritan, seni tari, membatik, mata pelajaran bahasa daerah, dan sebagainya. Pada tingkat SMA Negeri di Kota Yogyakarta terpilihlah tiga sekolah model, yaitu SMA Negeri 5, SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 11. Dari pengamatan awal terlihat bahwa pendidikan berbasis budaya sebagai upaya penanaman nilai budaya khas Yogyakarta ke dalam diri peserta didik merupakan salah satu strategi yang dapat diandalkan.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekuensi dari perkembangan globalisasi dewasa ini. Pendidikan yang berkarakter menuntut adanya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dan mempunyai daya saing di segala bidang. Penyeleksian dan penetapan sekolah model dilakukan dengan observasi dan analisis terhadap kemajuan ekstrakurikuler program budaya dari masing-masing sekolah. Program budaya yang diunggulkan seperti batik, karawitan, pencak silat, tari gaya Yogya, pedalangan wayang,

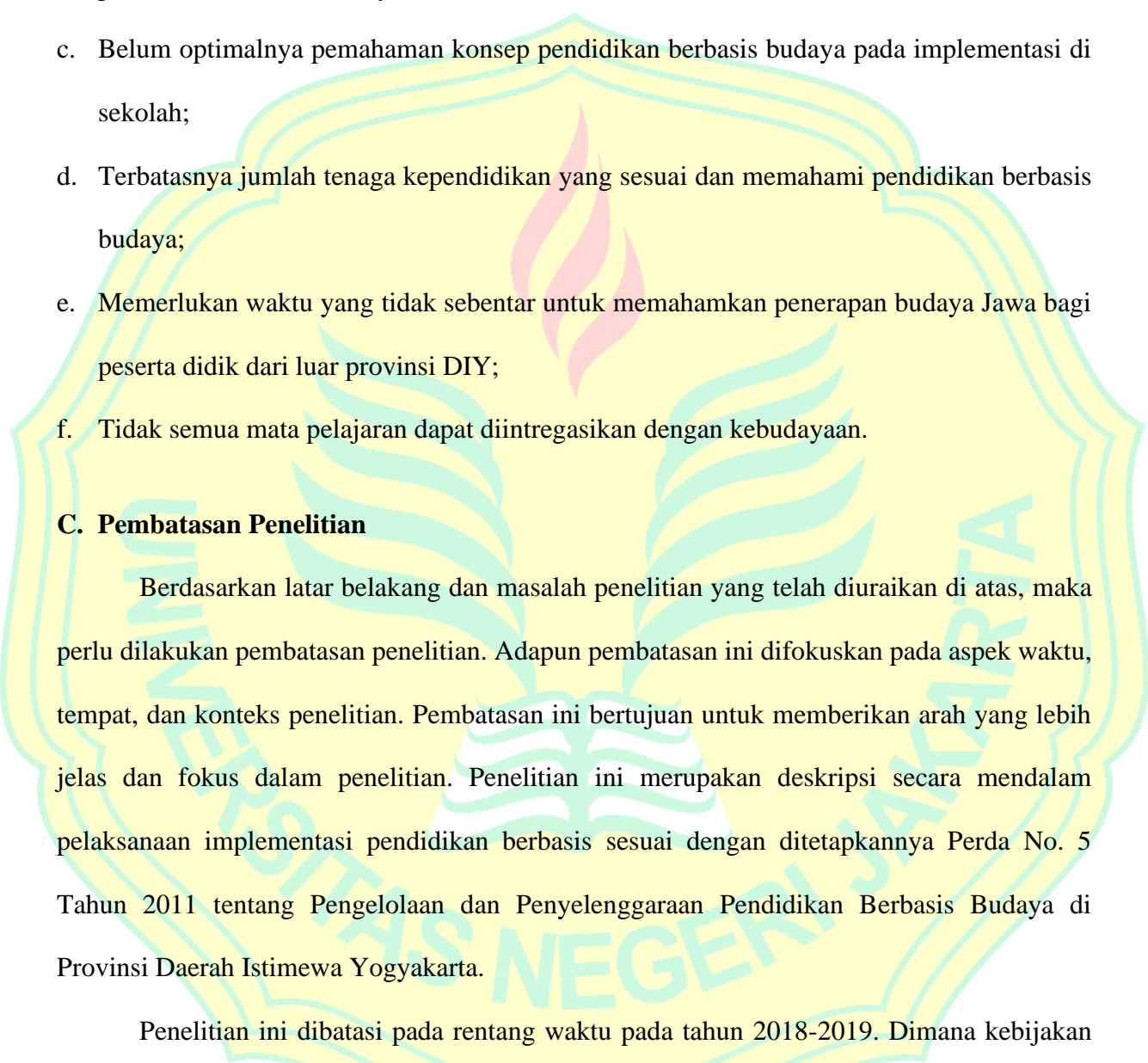
kethoprak, olahraga tradisional, sesorah, macapat, geguritan karawitan, seni tari, membatik, mata pelajaran bahasa daerah, dan sebagainya.

Saat ini pendidikan berbasis budaya cenderung dilihat sebatas pada formalitas pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sebagai contoh pada pendidikan muatan lokal pada kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kesenian budaya Jawa khas Yogyakarta. Seharusnya pelaksanaan dari Perda No. 5 Tahun 2011 Pendidikan Berbasis Budaya dipahami tidak hanya formalitas tetapi pada internalisasi nilai-nilai luhur budaya Jawa Yogyakarta pada setiap kurikulum dan praktik pembelajaran di sekolah. Untuk dapat memahami nilai-nilai luhur tersebut perlu pemahaman yang utuh tentang konsep pendidikan berbasis budaya. Namun pemahaman mengenai konsep pendidikan berbasis budaya belum dapat optimal baik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di beberapa SMA di Kota Yogyakarta diketahui terdapat kendala dalam penerapan pendidikan berbasis budaya yaitu masalah integrasi ke mata pelajaran, dukungan sarana prasarana dan penentuan indikator capaian terlaksananya kebijakan. Kendala lain dalam pelaksanaan pendidikan berbasis budaya adalah memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk memberikan pemahaman dan penerapan budaya Jawa bagi peserta didik dari luar provinsi Yogyakarta. Selain itu, tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan seni dan budayai masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diadakan kajian terkait permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya pada Tingkat SMA di Kota Yogyakarta”.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada dinas dan tiga SMA Negeri yang menjadi sekolah model berbasis budaya, diketahui beberapa permasalahan antara lain:

- 
- a. Masyarakat sudah mulai meninggalkan nilai luhur budaya khususnya budaya khas Yogya dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kegiatan yang mendukung pendidikan berbasis budaya;
 - c. Belum optimalnya pemahaman konsep pendidikan berbasis budaya pada implementasi di sekolah;
 - d. Terbatasnya jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dan memahami pendidikan berbasis budaya;
 - e. Memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk memahami penerapan budaya Jawa bagi peserta didik dari luar provinsi DIY;
 - f. Tidak semua mata pelajaran dapat diintegrasikan dengan kebudayaan.

C. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan penelitian. Adapun pembatasan ini difokuskan pada aspek waktu, tempat, dan konteks penelitian. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan arah yang lebih jelas dan fokus dalam penelitian. Penelitian ini merupakan deskripsi secara mendalam pelaksanaan implementasi pendidikan berbasis sesuai dengan ditetapkannya Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dibatasi pada rentang waktu pada tahun 2018-2019. Dimana kebijakan pelaksanaan program pendidikan berbasis budaya ditetapkan selama 7 tahun dan saat ini sudah berjalan hampir setiap sekolah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dari segi tempat penelitian, peneliti menggunakan wilayah difokuskan pada sekolah menengah atas negeri (SMA Negeri) yang berada di Kota Yogyakarta dengan membangun tiga karakteristik, yakni sekolah di pusat Kota Yogyakarta, sekolah negeri, dan sekolah model pendidikan

berbasis budaya. Dengan demikian dapat secara luas mewakili kondisi di wilayah Kota Yogyakarta sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Penelitian akan terfokus di tiga tempat yang menjadi sekolah model yaitu; SMA Negeri 5, SMA Negeri 9, dan SMA Negeri 11 di Kota Yogyakarta.

Sedangkan secara konteks penelitian ini menjelaskan fenomena yang ada dalam masyarakat tentang realisasi pendidikan berbasis budaya. Kemudian difokuskan pada pengelolaan manajemen pendidikan berbasis budaya pada tingkat sekolah. Kemudian, pengelolaan yang menjadi tujuan yakni diselenggarakan oleh Dikpora Provinsi dan kepala sekolah, serta pengembangan pendidikan berbasis budaya di sekolah. Sehingga lebih terlihat usaha untuk meningkatkan mutu sekolah dalam perspektif implementasi dari pendidikan berbasis budaya yang telah dilakukan oleh sekolah.

Berdasarkan latar belakang, batasan yang sudah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Perda No. 5 Tahun 2011) di SMA Negeri di Kota Yogyakarta, Adapun sub fokus penelitian yaitu;

1. Landasan Kebijakan, Sasaran, Visi Misi, Tujuan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
2. Sumber daya pada pelaksanaan kebijakan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Meliputi perencanaan, kurikulum, rancangan kegiatan, sumber daya manusia dan pembiayaan.
3. Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya pada SMA Negeri di Kota Yogyakarta.
4. Hasil capaian dan manfaat Pelaksanaan Kebijakan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya pada tingkat SMA Negeri di kota Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah landasan kebijakan yang meliputi landasan kebijakan, sasaran, visi misi dan tujuan yang sesuai untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya pada tingkat SMA di kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah sumber daya meliputi perencanaan, kurikulum, RPP, ketenagaan, sarana dan prasarana dan pembiayaan yang relevan pada kebijakan pendidikan berbasis budaya?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan yaitu pada pelaksanaan aktifitas pelaksanaan di sekolah, pemantauan dan supervisi sehingga kebijakan pendidikan berbasis budaya berjalan efektif?
4. Bagaimana hasil capaian dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) tujuan yakni tujuan umum dan khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Fokus permasalahan mencakup komponen-komponen yang akan dievaluasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka fokus penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Perda No. 5 Tahun 2011) di SMA Negeri di Kota Yogyakarta

2. Tujuan Khusus

- a. Kebijakan Perda, sasaran, visi-misi, tujuan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

- b. Sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan Kebijakan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Meliputi rancangan kegiatan, sumber daya manusia, dan pembiayaan
- c. Proses pelaksanaan kebijakan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya pada SMA Negeri di Kota Yogyakarta.
- d. Hasil capaian dan manfaat pelaksanaan kebijakan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya pada tingkat SMA Negeri di Kota Yogyakarta.

F. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Teoretis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu manajemen pendidikan khususnya pada konsep pendidikan budaya pada tingkat SMA
 - b. Menjadi bahan kajian penelitian tentang evaluasi implementasi tentang pendidikan berbasis budaya
 - c. Menjadi tambahan keilmuan tentang evaluasi implementasi pendidikan berbasis budaya pada jenjang SMA
- 2. Praktis
 - a. Dengan konsep pendidikan berbasis budaya yang diterapkan oleh Dikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bahan kajian dalam mengevaluasi implementasi Perda No. 5 Tahun 2011 terutama pada tingkat SMA.

- b. Bagi SMA Negeri 5, SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 11 hasil evaluasi ini berguna untuk meningkatkan dalam proses belajar mengajar, sarana prasarana, pembiayaan maupun manajemen sekolah.
- c. Informasi bagi para pendidik jenjang SMA tentang keberadaan, peran dan tanggungjawab yang harus dilakukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat.
- d. Sumber pengalaman tersendiri dalam melakukan penelitian dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- e. Sebagai umpan balik dan masukan bagi pihak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa kebijakan pendidikan berbasis budaya memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan dengan melakukan perbaikan, pengembangan, peningkatan kinerja, dan membantu pengembangan mutu sekolah dalam mengimplementasikan visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”
- f. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam pelaksanaan pendidikan berbasis budaya secara teoretis dan praktis.

G. Kebaharuan Penelitian

Penelitian tentang pendidikan berbasis budaya relatif telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada tentang pendidikan berbasis budaya dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu tentang Pendidikan Berbasis Budaya

No.	Peneliti /Journal	Uraian Hasil	Metode/Model
1	Robledo-Ardela, Cristina, Aguilar-Barrientor, Sara, Roman-Calderon, Juan P. (2016). <i>Journal of Teaching in International Business</i> 27(1):41,	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pendidikan berbasis budaya melalui pengembangan bahasa dapat menunjang partisipasi anggota di	Kuantitatif dengan anlalsisi regresi berganda

1	DOI:10.1080/08975930.2016.117254	dalam keberagaman budaya. Selain itu juga penelitian ini menyatakan bahwa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan juga memahami perbedaan budaya yang beragam.	
2	Paraskevi, Angelopoulou & Nikolaos, Manesis (2017), <i>British Journal of Education</i> , Vol.5, No.4, Pp. 9-18.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan lintas budaya yang diadopsi oleh guru selama saran pedagogis mereka sebagian besar stereotip. Mereka juga merujuk pada konsepsi awal pedagogi antar budaya yang lebih didasarkan pada penerimaan daripada dalam koeksistensi/ inklusi. Selain itu, guru tidak mencari konseling lebih lanjut untuk mengatasi kesulitan siswa, meskipun mereka mengakui masalah utama yang dihadapi oleh siswa yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Perilaku ini menarik dengan mempertimbangkan bahwa kesulitan-kesulitan ini merujuk pada bidang ilmiah yang tidak dicakup oleh pengetahuan dan tanggung jawab ilmiah guru. Akhirnya, hasilnya menunjukkan bahwa guru tidak merangkul aspek konseling dari peran mereka.	Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda.
3	Tonbuloglu, B., Aslan, D., & Aydin, H. (2016). <i>Eurasian Journal of Educational Research</i> , 64, 1-28, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.64.1	Pada analisis hasil ditemukan bahwa pengetahuan aktual para guru sehubungan dengan pendidikan multikultural dan keragaman ditemukan memadai dan pendapat mereka terhadap pendidikan multikultural diamati sebagian besar positif. Namun demikian, ada kebingungan dan prasangka serius berkaitan dengan konsep-konsep tertentu yang terkait dengan pendidikan multikultural dan pada masalah-masalah ini guru terlihat menderita kekurangan tertentu. Selain itu, analisis rencana Tahunan mengungkapkan bahwa jumlah tujuan dan kegiatan pencapaian, serta jenis alat penilaian dan evaluasi, termasuk yang menekankan multikulturalisme dan diversifikasi tidak mencukupi.	Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
4	Gabdulchakov, Valerian F.; Galimova, Elvira G.; & Yashina, Olga V. (2016), <i>IEJME—Mathematics Education</i> , VOL. 11, NO. 4, 755-766	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam rangka menyelesaikan berbagai model kombinasi teknologi aktif, kami menetapkan bahwa efektivitas teknologi pendidikan multikultural (aspek-	Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus- aktivitas

		<p>aspeknya seperti efisiensi, efektivitas, orientasi praktik) ditentukan pada tingkat pengajaran dengan berkembang dari teknologi inti komunikatif ke pemikiran kritis. teknologi, kemudian ke teknologi studi kasus, pembelajaran modul, teknologi proyek, pembelajaran berbasis masalah dan teknologi moderasi dengan seminar masalah ahli pada akhirnya; di tingkat studi - dengan berkembang dari memahami masalah, menentukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah, memilih argumen sebelum membahas cara-cara pemecahan masalah dan merangkum di seminar masalah ahli.</p>	
5	Septiana Ari Pudyastuti (2016)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan kurikulum pendidikan berbasis budaya dalam pengembangan karakter anak, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan budaya di TK Pedagogia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitiannya adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, guru, siswa, dan orang tua siswa. Objek penelitian adalah kurikulum pendidikan berbasis budaya dalam mengembangkan karakter anak</p>	Kualitatif deskriptif
6	Nur Astri Mitayani, dkk (2016), PELITA, Volume XI, Nomor 2 2016	<p>Penelitian ini adalah mengetahui deskripsi model sekolah berbasis budaya di SMP Negeri 3 Banguntapan Bantul dan mengetahui implementasi nilai karakter dan budaya yang dibangun sekolah terhadap siswa dan seluruh warga sekolah SMP Negeri 3 Banguntapan Bantul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Adapun subyek penelitian adalah warga sekolah SMP Negeri 3 Banguntapan Bantul, dengan pemilihan sampel purposive sample.</p>	Kualitatif deskriptif
7	Septiana Ari Pudyastuti, Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V Tahun 2016	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendiwo Kabupaten Kulon Progo, serta faktor pendukung dan penghambat</p>	Kualitatif deskriptif

implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD Negeri Mendirol Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ialah kepala sekolah, guru kelas, guru ekstrakurikuler, siswa, dan karyawan/TU. Faktor pendukung meliputi: budaya sekolah yang tercipta telah berjalan, adanya dukungan dan kerjasama dari orangtua siswa dan masyarakat, kemampuan dan pengalaman dari pendidik, serta antusias dan kemampuan peserta didik yang potensial. Sedangkan faktor penghambat meliputi minat peserta didik terhadap budaya masih berubah-ubah, adanya beberapa guru kurang memahami pendidikan berbasis budaya secara menyeluruh, dan belum lengkapnya sarana prasarana menjadi faktor penghambat yang utama.

8 Nur Djazifah ER, et. al. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Volume 8, Nomor 2, September 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya analisis terhadap implementasi pendidikan berbasis budaya (Perda no 5 Tahun 2011) di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai layanan pendidikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sosialisasi pendidikan berbasis budaya dilakukan secara terstruktur dari tingkat provinsi hingga lembaga penyelenggara kursus melalui workshop, TOT, seminar, FGD; 2) Tingkat kesiapan LKP dalam menjalankan pendidikan berbasis budaya dari aspek isi, proses, sarana prasarana dan sumber daya manusia terlibat dalam layanan pendidikan masyarakat ini berbeda-beda. Terdapat 46 LKP di DIY dengan kualifikasi terakreditasi BAN-PPN ada sebagian yang belum sepenuhnya menerapkan pendidikan berbasis budaya; 3) Beberapa kesulitan yang teridentifikasi kaitannya dengan implementasi Perda no 5 Tahun 2011 tentang pendidikan berbasis budaya ini meliputi kompleksitas

Kualitatif deskriptif

permasalahan yang dihadapi LKP, kesulitan dalam mencari indikator pendidikan berbasis budaya berdasarkan nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta sehingga tidak mudah untuk diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran, waktu yang digunakan untuk menyusun kurikulum berbasis budaya ke dalam format-format yang baru sangat panjang dengan tim yang sering berganti-ganti sehingga terkesan melelahkan

(Sumber: Kajian Literatur Penelitian)

Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih mendalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya pada tingkat SMA Negeri di Kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan melihat lebih mendalam tentang pendidikan berbasis budaya disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu untuk melihat hambatan dan usaha sekolah dalam pelaksanaan implementasi pendidikan berbasis budaya. Kebaruan dalam penelitian ini akan berdampak pada perubahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya pada tingkat SMA Negeri di Kota Yogyakarta. Bentuk kebaruan dalam penelitian adalah aspek model evaluasi penelitian dalam melaksanakan pendidikan berbasis budaya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dilihat dari pendekatannya dalam menganalisa implementasi kebijakan dengan suatu model yang dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu *Context, Input, Process* dan *Product (CIPP)*.

Dari beberapa penelitian sebelumnya terlihat memiliki kesamaan tentang implementasi pendidikan berbasis budaya, namun yang membedakan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya hanya dilakukan di satuan pendidikan secara parsial.
2. Penelitian yang pernah dilakukan hanya dalam aspek implementatif dari pendidikan berbasis budaya dan dibatasi oleh wilayah pemahaman kepala sekolah dan guru saja.

Penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan yang ditetapkan Dikpora Provinsi DIY, yaitu pendidikan berbasis budaya pada tingkat SMA di kota Yogyakarta yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis

hambatan dan usaha sekolah dalam pelaksanaan pendidikan berbasis budaya. Diharapkan dari penelitian ini terlihat sudut pandang yang lain dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya. Dengan menggunakan pendekatan evaluatif untuk menganalisis implementasi dengan model yang dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu *Context, Input, Process* dan *Product (CIPP)*.

Penelitian ini menjelaskan mulai dari konteks, input, proses dan output yang dijalankan dari Dikpora dan sekolah berbasis budaya. Jelas bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan dan belum pernah dilakukan. Penelitian ini menjadi penting karena studi yang mendalam dalam memahami konteks kebijakan pendidikan berbasis budaya, input, proses dan produk dari kebijakan pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda No. 5 Tahun 2011). Penggunaan standar nasional pendidikan (SNP) sebagai garis panduan digunakan peneliti untuk melihat sejauh mana implementasi pendidikan berbasis budaya khususnya pada tingkat SMA Negeri di Yogyakarta dapat mencapai harapan dan keinginan pemangku kepentingan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di masa yang akan datang.